

# Lampiran

## **LAMPIRAN I**

### **A. LAMPIRAN WAWANCARA**

1. Bagaimamana mekanisme pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah desa?
2. Apakah ada kendala pemerintah desa terkait dengan pengelolaan APBDes?
3. Bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan APBDes?
4. Bagaimana menyajikan atau menginformasikan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat?
5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
6. Apakah ada kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum?
7. Apakah telah sesuai hasil program APBDes dengan yang telah di rencanakan sebelumnya?

## B. REKAMAN HASIL WAWANCARA

Rumusan Masalah/Fokus penelitian	Uraian Jawaban Informan
<p>Bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di kecamatan larompong selatan.</p>	<p><b>A. DESA SAMPANO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan regulasi bahwa setiap tahun di lakukan dengan musyawarah desa awal termasuk dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) karena dasar pembuatan APBDes adalah RKPDDes agar dalam penyusunan APBDes memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat melalaui kementerian desa.</li> <li>2. Sama sekali tidak ada kendala karna semuanya di lakukan dengan musyawarah desa dengan dasar RKPDDes yang telah di sepakati bersama dengan perangkat-perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga dalam pengelolaan APBDes kami tidak memiliki kendala sama sekali.</li> </ol> <p><b>B. DESA DADEKO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kita melakukan musyawarah desa dengan menggunakan metode <i>bottom up yang</i> artinya dalam perencanaan APBDes kita mengikuti keinginan masyarakat dan melihat apa-apa saja yang di butuhkan atau yang di perlukan untuk kemakmuran mayarakat yang di bahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) karna dsar pembuatan APBDes itu dari RKPDDes.</li> <li>2. Kami sama sekali Tidak memiliki kendala karna dari awal prosesnya sudah bagus seperti yang saya katakan di awal bahwa semuanya di lakukan dengan musyawara desa beserta perangkat desa dan tokoh-tokoh masyrakat lainnya sehingga dalam pembuatan APBDes di desa dari tahun ke tahun kami tidak memiliki kendala dan s muanya telah sesuai dengan peraturan yang ada.</li> </ol> <p><b>C. DESA BATULAPPA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal ya itulah yang diprioritaskan. dengan melakukan musyawarah desa dan Pembahasan Rencana Perangkat Desa (RKPDDes) karna dalam pembuatan APBDes kami selalau melibatkan tokoh-tokoh msyarakat bersama dengan badan pengawas desa (BPD) untuk mengetahui apa saja yang di butuhkan masyarakat dan kemajuan desa kedepannya.</li> <li>2. Dalam pengelolaan APBDes kami tdak memiliki kendala karna semua di lakukan dengan musyawarah desa di sertai dengan tokoh masyarakat, perangkat-perangkat desa, sehingga dalam pengelolaan dan perencanaan APBDes kami tidak memeiliki kendala</li> </ol>

<p>Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di kecamatan larompong selatan.</p>	<p>dari tahun ke tahun.</p> <p><b>A. DESA SAMPANO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperti yang telah di musyawarakan dan di finalisasi itu di buat kan spanduk untuk di perlihatkan di tempat umum sehingga masyarakat yang ada di dalam desa bisa melihat sejauh mana pengelolaan APBDes yang kami lakukan dari tahun ketahun. Kami selaku pemerintah desa selalu transparan kepada masyarakat setiap tahunnya agar dalam pembuatan APBDes tahun berikutnya masyarakat bisa ikut serta mengajukan pendapat kepada kami selaku pemerintah desa demi kepentingan bersama.</li> <li>2. Dengan membuat spanduk APBDes serta menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDes, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa semua di lakukan dengan musyawarah desa sehingga pada saat musyawarah kami menginformasikan kepada masyarakat tentang pengelolaan anggaran yang kami lakukan.</li> <li>3. Setiap tahun ada instansi yang terkait untuk mengatasi pemkriksaan dokumen ke desa dari pemerintah kecamatan jadi secara akuntabilitas, secara pertanggungjawaban kami selaku pemerintah desa selalu terbuka dan transparan.</li> <li>4. Kami sama seklali tidak memeiliki kesulitan karna dalam pembuatan administrasi itu semuanya ada bukti pengeluaran yang di pegang oleh bendahara,nah dalam hal ini kami juga telah sesuai dengan standar atau peraturan yang telah di tetapkan.</li> <li>5. Dalam hal ini semuanya telah sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya,apa yang telah kami sepakati berasama-sama dalam musyawarah desa selalu sesuai dengan apa yang di harapkan.</li> </ol> <p><b>B. DESA DADEKO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbicara tentang transparansi, saya sebagai penanggungjawab atau pemerintah desa selalu menyampaikan semua anggaran pendapatan belanja desa kepada seluruh masyarakat desa, sehingga terjadi transparansi kepada seluruh masyarakat agar tidak ada kecurigaan bahwa alokasi-alokasi dana desa ini di kemanakan, jadi seluruh anggaran pendapatan belanja desa itu di sampaikan secara terbuka kepada umum dengan catatan bahwa kita perlu memeperhatikan juknis-juknis yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui kementrian desa dengan tidak meleset dari peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Dalam penyajian APBDes di masyarakat kami di desa selalu mengadakan rapat koordinasi, selalu menjunjung tinggi rembuk desa jadi segala keputusan yang akan kami ambil di rapatkan terlebih dahulu kemudian</li> </ol>
--	--

	<p>melalui rapat itu kami menginformasikan kepada seluruh peserta rapat keterwakilan dari seluruh masyarakat desa untuk mendengarkan informasi-informasi berkaitan dengan belanja desa, jadi secara transparan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui forum, di samping itu kami juga membuat baliho untuk di perlihatkan di tempat umum yang bisa di lihat secara langsung oleh masyarakat bahwa anggaran pendapatan belanja desa sekian kemudian alokasi anggarannya di gunakan untuk apa. Jadi kami memang sudah menyiapkan hal-hal sedemikian rupa supaya informasi pelaksanaan APBDes secara menyeluruh transparan kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kami selaku pemerintah desa selalu bertanggung jawab dengan semua pengelolaan dana desa karna kenapa semua belanja desa itu dikelola oleh bendahara, di laporkan kepada kami apa kebutuhannya, apa yang perlu kami setuju dan apa yang tidak perlu kami setuju. Jadi semua ada bukti fisik dalam bentuk pertanggungjawaban yang kami lakukan di desa secara akuntabilitas dan pertanggungjawaban karna memang kami lakukan sesuai dengan juknis, sesuai dengan program, secara terbuka dan secara transparan.</li> <li>4. Kalau kita berbicara tentang kesulitan pemerintah dalam membuat pertanggungjawaban, kami sama sekali tidak mengalami kesulitan karna kenapa semua bukti fisik pertanggungjawaban administrasi pertanggungjawaban pengeluaran dana desa itu semua ada melalui bendahara. Jadi bendahara sama sekali tidak memiliki kesulitan dalam mempertanggungjawabkan administrasi dan ini sudah kami lakukan sesuai dengan standar yang berlaku, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan baku yang telah di keluarkan oleh kementerian desa.</li> <li>5. Selalu apa yang kami rencanakan dan sudah di sepakati secara bersama-sama dalam musyawarah desa, selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, walau ada yang meleset itu hanya sekian persen minim sekali yang tidak sesuai dengan harapan tapi sudah 99% di anggap bahwa apa yang sudah menjadi hasil dari program APBDes desa itu sudah sesuai dengan apa yang telah di renanakan sebelumnya dan sesuai dengan program-program yang telah di sepakati bersama-sama.</li> </ol> <p><b>C. DESA BATULAPPA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme transparansi yang kami lakukan di desa itu apa yang telah kami sepakati bersama dan apa yang telah kami program, itu di buatkan baliho atau spanduk transparansi kemudian kami pajangkan di tempat</li> </ol>
--	--

	<p>umum sehingga masyarakat bisa melihat dengan seksama alokasi dana desa di gunakan untuk apa dan apa-apa saja program yang kami buat dalam pengelolaan alokasi dana desa.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kami di desa melakukan musyawarah kembali dengan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai informasi-informasi belanja desa, jadi secara transparan dan secara akuntabilitas kami selalu terbuka kepada masyarakat. Kemudian setiap tahun kami buat baliho realisasi untuk di perlihatkan kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang telah kami programkan semuanya terealisasi dengan baik dan jujur.</li><li>3. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kami selalu bertanggungjawab dengan pengelolaan alokasi dana desa karna kenapa semua belanja dana desa itu memiliki bukti fisik yang di pegang oleh bendahara, jadi semua ada bukti-bukti dalam pengelolaan alokasi dana desa.</li><li>4. Sama sekali kami tidak memiliki kesulitan karna kenapa semua bukti fisik administrasi dan semua pertanggungjawaban pengeluaran dana desa itu ada di pegang oleh bendahara, jadi kami sama sekali tidak memiliki kesulitan sama sekali dalam mempertanggungjawabkan administrasi dan ini sudah sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.</li><li>5. Dalam hal ini apa yang telah kami rencanakan dan telah kami sepakati bersama-sama dalam musyawarah desa selalu sesuai dengan apa yang kami harapkan, jika ada yang tidak sesuai itu hanya beberapa persen saja namun 95% apa yang sudah menjadi hasil dari program APBDes di desa kami itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kami harapkan.</li></ol>
--	---

## Lampiran II

### Dokumentasi Di Masing - Masing Desa

#### Desa Sampono



#### APBDes Desa Sampano





Desa Dadeko



APBDes Desa Dadeko

**INFO GRAFIS DESA DADEKO KEC. LAROMPONG SELATAN** "Desa Membangun Indonesia"

**APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020**

**PENDAPATAN Rp. 1.168.939.211** **BELANJA Rp. 1.168.939.211**

**DANA DESA Rp. 809.467.000**

**BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Rp. 15.942.211**

**ALOKASI DANA DESA Rp. 343.980.000**

Kategori	Sub-kategori	Anggaran (Rp)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	PENYEDIAAN TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp. 7.800.000
	PENYEDIAAN PENGHILANGAN TETAP & TUNJANGAN PERANGKAT DESA	Rp. 163.700.000
	PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT DESA	Rp. 6.105.600
	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Rp. 33.374.400
	PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD	Rp. 40.200.000
	PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD	Rp. 13.593.600
	PENYEDIAAN PEMBAYARAN HONORIFER PEMDES	Rp. 18.000.000
	PENYELENGGARAAN MUSDES	Rp. 1.800.000
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA	Rp. 1.255.000
	PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA	Rp. 3.375.400
PEMBANGUNAN DESA	PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD	Rp. 5.000.000
	PENGUSIAN PERANGKAT DESA	Rp. 3.600.000
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA	Rp. 317.200.000
	PEMBANGUNAN PAGAR TK	Rp. 33.227.000
	PENYERVISAN PEMBIAYAAN DESA (INSENTIF KPMD)	Rp. 3.600.000
	PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN DESA	Rp. 3.000.000
	PENYELENGGARAAN POSYANDU	Rp. 14.400.000
	PENYELENGGARAAN PPKBD	Rp. 1.200.000
	PENYELENGGARAAN BEMRUG STUNTING	Rp. 1.000.000
	PEMELIHARAAN PEMAKAMAN DESA	Rp. 2.580.000
PEMBANGUNAN IRIGASI TERSIER	Rp. 430.562.000	
PEMBANGUNAN TALUD	Rp. 63.970.000	
PEMBANGUNAN PLAT DRUCKER	Rp. 116.230.000	
PEMBANGUNAN RABAT BETON	Rp. 96.011.000	
PEMANGGARAN INFORMASI PUBLIK DESA	Rp. 705.000	
PENGADAAN JARINGAN INFORMASI KOMUNIKASI	Rp. 7.500.000	
PEMANGGARAN JARINGAN INFORMASI KOMUNIKASI	Rp. 263.985.000	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	PENYELENGGARAAN POS KEAMANAN DESA	Rp. 3.600.000
	KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	Rp. 700.000
	PEMBINAAN KEBUDAYAAN UMAT BERAGAMA	Rp. 17.500.000
	KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	Rp. 5.500.000
	PEMBINAAN LPM	Rp. 1.000.000
	PEMBINAAN PKK	Rp. 5.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Rp. 2.500.000
	PEMBINAAN KARANG TARUNAN	Rp. 2.000.000
	PEMBANGUNAN RUMAH NELAYAN	Rp. 17.800.000
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 15.492.211
	PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Rp. 4.500.000
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 19.992.211
	PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2.000.000
PEMBIAYAAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 2.000.000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 33.027.371
PEMBIAYAAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 33.027.371
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 33.027.371

Perc. Yus Art.



## Desa Batulappa



## APBDes Desa Batulappa





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM)

Ll. 2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo  
Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Bunturu, Kota Palopo (91959) – Telp/Fax: (0471) 327429

Nomor : 047/III.3.AU/LPPM/F/2020 Palopo, 15 April 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Camat Larompong Selatan  
Di\_  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) pada Universitas Muhammadiyah Palopo diwajibkan menyusun karya ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu syarat penyelesaian studi. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian untuk memperoleh data yang valid guna mendukung dan terlaksananya penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan maksud tersebut, mohon kiranya diberikan izin meneliti, kepada:

Nama : Muallim Bustam  
Stambuk/NIRM : 201630128  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Fakultas : FEB  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Babang, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu  
No. Hp. : 082296076113

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Larompong Selatan".

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

  
Kepala,  
Goso, S.E., M.M  
NIDN: 0912067603

Tembusan:  
- Ketua Prodi  
- Peringgal





# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

Alamat : Jalan poros Belopa-Makassar KM 32 Kode pos 91998

Bonepute, 22 April 2020

Nomor : 443/174/KLS/III/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Desa Se-Kec.Lar-sel  
Masing - masing  
Di, -  
Tempat

Dengan Hormat .

Berdasarkan surat permohonan dari ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Univesitas Muhammadiyah Palopo Nomor : 003/III.3.AU./LPPM/F/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal permohonan penelitian , maka dengan ini, memberikan izin kepada :

Nama : Muallim Bustam  
Stambuk /NIRM : 201630128  
Jenis kelamin : Laki -laki  
Jurusan /program studi : Akuntansi  
Alamat : Jl. Imbara I  
No. Hp : 082296076113

Untuk melakukan penelitian ke desa desa dalam wilayah Kecamatan Larompong Selatan sebagai persyaratan dalam penulisan Skripsi dengan judul " Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) di Kecamatan Larompong Selatan.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat,  
  
**H. KAMAL S.Pd. MMf**  
Pangkat, Pembina  
Nip. 19651231 199103 1 100

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu ( Sebagai Laporan ) di Belopa
2. Ketua LPPM Univeritas Muhammadiyah Palopo
3. Peringgal.